BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompetensi perangkat daerah merupakan faktor penting yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai pelaksana utama pengelolaan keuangan publik, perangkat daerah dituntut memiliki kemampuan teknis, pemahaman mendalam terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta keterampilan dalam menerapkan sistem akuntansi yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengelola keuangan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Makassar. daerah**.** Kompetensi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan publik, karena melalui kompetensi yang baik, aparatur dapat melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengelola keuangan yang kompeten tidak hanya memahami aturan dan prosedur teknis, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dalam menafsirkan data keuangan, mengambil keputusan yang tepat, serta menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kompetensi yang tinggi mencerminkan penguasaan terhadap Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah, serta regulasi keuangan lainnya seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pemahaman dan keterampilan tersebut membuat proses penyusunan laporan keuangan berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai standar, sehingga menghasilkan laporan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelola keuangan yang memiliki kompetensi tinggi cenderung bekerja dengan lebih hati-hati, teliti, dan berintegritas. Mereka memahami pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan laporan, menjaga keakuratan data transaksi, serta memastikan kepatuhan terhadap sistem dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kompetensi aparatur berperan langsung dalam menjaga kualitas substansi dan bentuk laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kompetensi yang baik turut mendukung penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Pengelola keuangan yang terampil mampu mengoptimalkan penggunaan aplikasi seperti SIMDA Keuangan, SIPD, atau SIKD untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga meminimalkan kesalahan pencatatan dan duplikasi data yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BPKAD Kota Makassar merupakan strategi fundamental untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah**.** Kompetensi yang baik tidak hanya diukur dari pengetahuan teknis semata, tetapi juga mencakup kemampuan analisis, pemecahan masalah, tanggung jawab, serta komitmen moral dan etika kerja yang tinggi. Aparatur yang memiliki integritas dan profesionalisme akan selalu berupaya menyajikan laporan keuangan yang objektif, jujur, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengelola keuangan berperan sebagai determinan utama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**.** Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas tinggi, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pendidikan formal, pelatihan teknis (diklat), serta pembinaan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai prinsip *good governance* dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta terpercaya.

B. Rekomendasi

Berikut adalah beberapa saran yang bisa diberikan terkait temuan penelitian.

1. Mendorong Program Peningkatan Kapasitas. Pemerintah daerah sebaiknya merancang program pengembangan kemampuan pegawai secara berkelanjutan, mencakup pelatihan akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan keterampilan analisis data agar kompetensi terus terjaga.
2. Memperdalam Pemahaman SAP. Diperlukan upaya terstruktur untuk meningkatkan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui workshop, bimbingan teknis, atau pembelajaran terarah, sehingga laporan yang dihasilkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penguatan Integrasi Teknologi dan Keahlian. Kemampuan teknis pegawai perlu diimbangi dengan keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indinesia (SIPD-RI), sehingga proses pelaporan lebih cepat, akurat, dan efisien.
4. Pengembangan Keterampilan Non-Teknis. Selain penguasaan teknis, perangkat daerah juga memerlukan pelatihan pada aspek komunikasi, koordinasi tim, dan pengambilan keputusan untuk mendukung mutu laporan.
5. Penilaian Kompetensi secara Rutin. Dilakukan evaluasi kompetensi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

serta menyesuaikan program pelatihan sesuai kebutuhan aktual pegawai.

C. Produk Tesis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelola keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kota Makassar. Namun, berdasarkan analisis deskriptif dan hasil observasi lapangan, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Kelemahan tersebut berkaitan dengan aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional yang belum merata di antara pegawai. Kondisi ini menimbulkan perbedaan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan dan berdampak pada kualitas hasil pelaporan yang belum optimal di seluruh unit kerja.

Adapun kelemahan yang teridentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya penguasaan pengetahuan teknis mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi keuangan daerah, terutama bagi pegawai yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Keterampilan dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIMDA/SIPD) masih bervariasi, sehingga berisiko menghambat ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

3. Sikap profesional, tanggung jawab, dan kedisiplinan kerja sebagian pegawai masih perlu diperkuat agar tercipta budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas.
4. Program pelatihan dan pembinaan yang masih belum menyeluruh terhadap semua pegawai, sehingga hasilnya belum sepenuhnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang dapat menjawab tuntutan atas peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Fungsi BPKAD dituntut menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Namun di sisi lain, kemampuan teknis dan profesional pegawai belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan hasil penelitian.

Penelitian ini menghasilkan sebuah produk dalam bentuk *Policy Brief* dengan judul “Pelatihan Wajib Untuk Pengelola Keuangan: Langkah Strategis Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Produk tesis ini diharapkan dapat membantu dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan kompetensi pengelola keuangan di Kota Makassar. Diharapkan dengan adanya *Policy Brief* ini dapat mendorong semangat para ASN untuk terus mengasah dan mengembangkan kompetensinya sehingga kemudian dapat mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera memenuhi jam pendidikan dan pelatihan pengelola keuangan sehingga kompetensi pengelola keuangan yang semakin baik juga

berbanding lurus dengan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Produk tesis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya BPKAD, dalam strategi peningkatan kompetensi pengelola keuangan.
2. Menyediakan model konseptual pembinaan dan evaluasi kompetensi pegawai berbasis dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.
3. Menjadi pedoman praktis bagi unit keuangan daerah dalam merancang program pelatihan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada kualitas laporan keuangan.